

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- , *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Balai Harta Peninggalan. *Buku Saku Balai Harta Peninggalan Semarang*. Semarang, 2023.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Ismail, Nurhasan. *Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak atas Tanah Teori dan Praktek*. Malang: PT Bumi Puthuk Shankara (Bikara), 2024.
- Kartikawati, Dewi Ratna. *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*. Kota Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugroho, Sigit Sapto. *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam, 2016.
- Purba, Elivis F. dan Simanjuntak, Parulian. *Metode Penelitian*. Medan: Sadia, 2012.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustakabarupress, 2022.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Suparman, Eman. *Hukum waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.

Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2022.

B. Jurnal

Arif Darmawan dan Hanny Tristi Perdani, "Penyuluhan tentang Prosedur Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah karena Perbuatan Hukum", *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 3, No. 1 (Januari 2014) : 13-16, <https://journal.uui.ac.id/ajie/article/view/7794/6782>

Cry Tendean, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah Akibat Hibah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria", *Lex Privatum IV, No. 7 (Agustus 2016): 140-146*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/13256>

Maria Susanti, Azmi Fendri, Yaniwati, "Peralihan Hak Milik atas Tanah berdasarkan Hibah Wasiat dengan Penerima Wasiat Meninggal Dunia di Provinsi Sumatera Barat", *Unes Law Review* 6, No.1 (September 2023) : 243-257, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/843>

Monica Sriastuti Agustina, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat dalam penyerahannya oleh Orang Lain ke Notaris". *Yustitiabelen* 6 No. 1, (Juli 2020) : 48-68, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.224>

Mudzakirah Al Mulia, Anwar Borahima, Winner Sitorus, "Akibat Hukum Akta wasiat yang Tidak Dilaporkan Kepada Daftar Pusat Wasiat oleh Notaris", *Justisi* 8, no.1, (Januari 2022) : 55-66 <https://doi.org/10.33506/js.v8i1.1481>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316)

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372)

Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 2127)

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 986 Tahun 2020)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1077 Tahun 2022)

D. Internet

Administrator, "Syarat Pendaftaran Penetapan Ahli Waris", <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616649322> (diakses pada 12 Juli 2025 pukul 06.10 WIB)

Hasanah, Sovia. "Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-penetapan-pengadilan-lt591a552ec941d/> (diakses pada 25 April 2025)

Heriani, Fitri Novia. "Begini Prosedur Pembuatan Surat Wasiat", <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-prosedur-pembuatan-surat-wasiat-yang-perlu-diketahui-lt600eb775c5c12/?page=2> (diakses pada 17 Februari 2025)

Pengadilan Agama Bantul, "Syarat Pendaftaran Gugatan Waris", <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616649322> (diakses pada 12 Juli 2025 pukul 06.10 WIB)

Purnamasari, Irma Devita Purnamasari. "Wasiat Sebagai Dasar Pembuatan Surat Keterangan Waris", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wasiat-sebagai-dasar-pembuatan-surat-keterangan-waris-lt5219655ef3f28/> (diakses pada 25 April 2025)

Saiful. "Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kompilasi-hukum-islam-dalam-perspektif-politik-hukum-indonesia-oleh-saiful-s-ag-mh-24> (diakses pada 07 Oktober 2024).

Susetyo, Heru. "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854/> (diakses pada 18 Desember 2024)

Syarkowi, Asmu'i. "Mengenal Putusan (Peradilan) Perdata", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mengenal-putusan-peradilan-perdata-oleh-h-asmu-i-syarkowi-14-3> (diakses pada 25 April 2025)

Tim Hukumonline, "Macam-Macam Surat Wasiat Menurut KUH Perdata", <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-macam-surat-wasiat-menurut-kuh-perdata-lt66ed5d26a18e7/?page=2>, (diakses pada 15 Februari 2025)

E. Skripsi, Tesis dan/atau Disertasi

Maliani, Sri. "Pembedaan Kewenangan Pembuatan Surat Tanda Bukti Ahli Waris ditinjau dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2018.

Putri, Revania Nadira. "Implementasi Pasal 111 ayat (1) Huruf C Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 di Kota Yogyakarta", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Riyanda, Elita Nafiah. "Pembuatan Surat Tanda Bukti sebagai Ahli Waris bagi Warga Negara Indonesia yang Meninggal di Luar Negeri", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.

Setiawan, Krisna Agung. "Implementasi Pembuatan Surat Keterangan Waris dalam peralihan Hak atas Tanah berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Huruf C angka 5 PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021 di Kabupaten Kulon Progo", *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, 2022.